



## Analisis Konsep Demokrasi Semu dalam OSIS : Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan

Ali Wafa Rabbani<sup>1\*</sup>, Kokom Komalasari<sup>2</sup>, Nisrina Nurul Insani<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email : [baniali07@upi.edu](mailto:baniali07@upi.edu)<sup>1</sup>, [kokom@upi.edu](mailto:kokom@upi.edu)<sup>2</sup>, [nisrina.n.i@upi.edu](mailto:nisrina.n.i@upi.edu)<sup>3</sup>

Alamat: Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung.

Korespondensi penulis : [baniali07@upi.edu](mailto:baniali07@upi.edu)\*

**Abstract.** *The concept of selecting the student council president in schools that implements democratic values is still often found to be misunderstood in practice. The continuity of the student council president election which should be carried out freely, honestly, and fairly but often there are still influences from irresponsible parties. Democratic values that should uphold the rights of every human being are tarnished by dirty practices that often occur in the election of the student council president in schools. This study uses a research method with data collection through library studies from various literature such as articles, websites, the internet, news and others that are credible and trusted.*

**Keywords:** *Democracy, OSIS, School.*

**Abstrak.** Konsep pemilihan ketua osis di sekolah yang mengimplementasikan nilai demokrasi masih sering ditemukan kesalahpahaman dalam praktiknya. Keberlangsungan pemilihan ketua osis yang seharusnya terlaksana secara bebas, jujur, dan adil tetapi seringkali masih ada pengaruh pengaruh dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Nilai demokrasi yang sudah sepatutnya menjunjung tinggi hak hak setiap manusia namun menjadi ternodai oleh praktik kotor yang seingkali terjadi dalam pemilihan ketua osis di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dari berbagai literatur seperti artikel, website, internet, berita dan lainnya yang kredibel dan terpercaya.

**Kata kunci:** Demokrasi, OSIS, Sekolah.

### 1. LATAR BELAKANG

Konsep pemilihan ketua osis di sekolah yang mengimplementasikan nilai demokrasi masih sering ditemukan kesalahpahaman dalam praktiknya. Keberlangsungan pemilihan ketua osis yang seharusnya terlaksana secara bebas, jujur, dan adil tetapi seringkali masih ada pengaruh pengaruh dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Nilai demokrasi yang sudah sepatutnya menjunjung tinggi hak hak setiap manusia namun menjadi ternodai oleh praktik kotor yang seingkali terjadi dalam pemilihan ketua osis di sekolah. Dalam proses sosialisasi politik, pendidikan sisitem persekolahan mempunyai peran yang penting, khususnya untuk kelangsungan sistem politik yang ada. Peranan pendidikan tersebut antara lain sebagai sosialisasi kultur politik di kalangan siswa, seleksi, rekrutmen, dan melatih calon pemimpin politik, dan integrasi bangsa (Juanda, 2019).

Berdasarkan kutipan tersebut, sudah seharusnya sekolah menjadi wadah dalam memberikan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi menjadi salah satu hal yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak sejak dini agar anak memiliki jiwa

demokratis di kemudian hari. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dan krusial karena Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu sarana yang bisa meningkatkan jiwa demokratis anak di sekolah. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 60% siswa merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan demokrasi yang menekankan partisipasi aktif dan kenyataan di banyak sekolah, di mana siswa tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka di sekolah.

Implementasi budaya demokrasi di lingkungan sekolah sangat penting untuk diwujudkan di era milenial. Langkah konkret yang menarik untuk direalisasikan bersama, terutama oleh insan pendidik dan pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, adalah menciptakan ruang hidup dan praktek pendidikan sebagai sebuah kehidupan yang nyata. Kehidupan sekolah merupakan jembatan atau transisi bagi anak dalam rangka penanaman nilai-nilai demokrasi dalam diri seorang anak. Hal ini dilakukan sekolah merupakan pengganti orang tua dalam mendidik seorang anak. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi yang telah diajarkan maka sekolah memberikan sarana kepada siswa berupa organisasi. (Aulawi, 2019).

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan wadah yang dirancang untuk melatih keterampilan kepemimpinan, tanggung jawab, dan partisipasi demokratis di kalangan pelajar. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), OSIS seharusnya menjadi ruang aktualisasi bagi siswa untuk mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi aktif, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Melalui mekanisme seperti pemilihan ketua OSIS secara langsung, forum musyawarah, dan program-program partisipatif lainnya, OSIS diharapkan menjadi miniatur praktik demokrasi di lingkungan sekolah. Namun, dalam praktiknya, idealisme demokrasi ini sering kali tereduksi menjadi formalitas belaka. Fenomena pseudokrasi merupakan sebuah kondisi di mana demokrasi hanya bersifat simbolis dan tidak mencerminkan kekuasaan sejati di tangan peserta didik—semakin sering terjadi. Pemilihan ketua OSIS terkadang diwarnai dengan intervensi pihak sekolah, pengaruh guru, atau dominasi kelompok tertentu, yang membatasi ruang kebebasan siswa untuk menentukan pilihan secara independen. Selain itu, banyak program kerja OSIS yang ditentukan sepenuhnya oleh pihak sekolah tanpa melibatkan aspirasi siswa secara nyata, sehingga menghilangkan esensi partisipasi aktif dari anggota OSIS itu sendiri.

Dari perspektif PKn, fenomena pseudokrasi ini menjadi ironi karena sekolah seharusnya menjadi laboratorium demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun, dengan adanya praktik pseudokrasi, tujuan tersebut sulit tercapai secara optimal. Permasalahan ini menjadi semakin krusial karena bertentangan dengan tujuan pendidikan demokrasi yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Ketika praktik demokrasi di sekolah hanya menjadi formalitas, siswa kehilangan kesempatan untuk memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Studi kasus ini bertujuan untuk mengkritisi praktik semu tersebut dan mengusulkan solusi agar demokrasi di lingkungan sekolah tidak hanya menjadi ilusi, melainkan benar-benar dijalankan secara substansial. Penting bagi institusi pendidikan untuk mengatasi fenomena ini dengan mendorong pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Sekolah perlu memberikan ruang kebebasan yang lebih luas bagi siswa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan mereka dalam diskusi kritis, dan memperkuat fungsi edukatif OSIS sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Demokrasi**

Demokrasi memiliki beberapa teori yang relevan dengan kondisi dinamika yang terjadi dalam OSIS. Menurut (Ukasah, 2024) berikut adalah beberapa teori tersebut:

**Teori Demokrasi Klasik:** Penelitian tentang demokrasi biasanya dimulai dengan memahami teori klasik dari filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Plato menyoroti kelemahan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana kebijaksanaan tidak selalu berlaku, dan Aristoteles membahas berbagai bentuk demokrasi dan mengemukakan ide bahwa hukum yang baik diperlukan untuk menjamin keadilan.

**Teori Liberal tentang Demokrasi:** Teori liberal tentang demokrasi menekankan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan aturan hukum. Teori ini menempatkan nilai-nilai liberal sebagai dasar bagi demokrasi yang efektif, di mana perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan pemerintah adalah prioritas utama.

**Teori Partisipatif dan Deliberatif:** Metode ini menekankan betapa pentingnya bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan diskusi yang berbasis pada rasionalitas dan argumen yang kuat. Menurut teori ini,

demokrasi adalah tidak hanya proses pemilihan politik tetapi juga tempat di mana warga negara dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

**Teori Representatif dan Elitist:** Teori ini menekankan peran perwakilan politik yang dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan atas nama mereka. Di sisi lain, teori elitisme berpendapat bahwa kekuasaan sebenarnya terletak pada sekelompok elit yang memiliki kontrol atas sumber daya politik. Namun, teori representatif menekankan betapa pentingnya hubungan antara wakil dan warga yang diwakilinya untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi.

**Teori Demokrasi Subsider:** Metode ini menunjukkan bahwa otonomi lokal, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas sangat penting dalam demokrasi. Menurut teori ini, demokrasi tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal, di mana masyarakat memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri.

### **Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan, juga dikenal sebagai pendidikan publik, adalah program pendidikan yang melibatkan interaksi antara disiplin ilmu dan didasarkan pada teori ilmu sosial multidimensi dan interdisipliner, dan didasarkan pada ilmu politik. Kewarganegaraan, menurut National Council for Social Research (NCSS), adalah proses yang mencakup semua pengaruh positif dan bertujuan untuk membentuk pandangan warga tentang peran mereka dalam masyarakat. Sebagai program pendidikan, tujuan utama kewarganegaraan adalah membangun warga negara yang lebih baik berdasarkan kondisi, standar, dan standar ukuran (sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945) (Cholisin, 2000: 1.7).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan telaah pustaka yang ada, yang mencakup serangkaian tugas yang terkait dengan pengumpulan data dari sumber tekstual, pemeriksaan dan pendokumentasian wawasan, serta analisis bahan yang digunakan dalam penelitian (Syafitri, 2020). Selain itu, metode penelitian menggunakan studi literatur dari berbagai sumber yang kredibel. Sumber yang digunakan menggunakan artikel, berita, internet, dan sumber sumber lainnya yang terpercaya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di beberapa sekolah, pengambilan keputusan sering kali dilakukan secara sentralistik, yaitu lebih didominasi oleh pihak tertentu, seperti kepala sekolah atau guru, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Hal ini menghalangi terwujudnya prinsip demokrasi yang seharusnya menekankan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.

Dalam konteks sekolah, prinsip demokrasi idealnya mengharuskan adanya partisipasi siswa dalam membuat keputusan, baik itu terkait dengan kebijakan sekolah, peraturan kelas, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Namun, di banyak sekolah, keputusan-keputusan tersebut sering kali ditentukan oleh pihak manajemen sekolah tanpa konsultasi atau bahkan informasi yang cukup untuk siswa. Misalnya, keputusan mengenai penentuan kurikulum, kegiatan sekolah, atau bahkan evaluasi kinerja guru, sering kali hanya melibatkan sebagian kecil pihak yang dianggap berwenang, tanpa mempertimbangkan masukan atau pendapat dari siswa. Kurangnya partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan ini berpotensi menurunkan rasa memiliki dan tanggung jawab siswa terhadap kebijakan yang ada. Siswa tidak merasa dihargai dalam proses tersebut, sehingga dapat mengurangi motivasi mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan sekolah yang demokratis. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan tujuan pendidikan demokrasi itu sendiri, yaitu untuk membentuk individu yang memahami dan menghargai proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak secara setara.

Dalam konteks negara apabila terdapat fenomena seperti itu maka akan menimbulkan kehancuran kepada negara itu sendiri. Dalam kehidupan bernegara juga fenomena seperti ini biasa dikenal dengan sebutan oligarki. Menurut Safitri (2024) Oligarki mengacu pada bentuk kekuasaan di mana sebagian besar kekuasaan politik atau ekonomi dikendalikan oleh kelompok kecil orang. Dalam sistem oligarki, meskipun ada elemen-elemen demokratis atau perwakilan formal, pada kenyataannya, keputusan penting sering kali diambil oleh sekelompok individu yang memiliki pengaruh besar.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan perubahan pola pikir dan budaya di sekolah yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam setiap aspek pengambilan keputusan. Salah satunya bisa melalui pembentukan forum atau wadah diskusi yang melibatkan siswa, baik dalam bentuk perwakilan siswa, musyawarah kelas, atau berbagai kegiatan yang memberi ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka secara langsung. Dengan demikian, pendidikan demokrasi dapat lebih diterapkan dengan efektif dan siswa pun

merasa memiliki kontrol dan peran dalam lingkungan pendidikan mereka. (Sobri & Umar, 2022).

OSIS menjadi wadah bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi di dalam lingkungan sekolah. Ada beberapa cara bagaimana demokrasi dapat diterapkan dalam OSIS.

- a. Pemilihan Ketua OSIS : Proses pemilihan ketua OSIS ini dilakukan secara demokratis, di mana setiap siswa memiliki hak suara untuk memilih calon yang dianggap paling layak. Hal ini mengajarkan siswa betapa pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan dan menghargai suara mayoritas.
- b. Rapat dan Diskusi : Dalam kegiatan OSIS sering diadakan rapat dan diskusi untuk merencanakan serta mengevaluasi program kerja dari OSIS. Setiap anggota OSIS memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide yang mencerminkan prinsip kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
- c. Toleransi dan Kerjasama Kegiatan OSIS mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini akan membantu siswa untuk bersikap toleransi dan saling menghargai antar siswa.
- d. Transparansi Pengurus OSIS diharapkan dapat bertindak transparan dalam menjalankan tugasnya. Pengurus harus memberikan laporan kegiatan dan keuangan secara terbuka kepada anggota OSIS lainnya. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Kebebasan Berpendapat OSIS memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan ide, pendapat, dan aspirasi mereka. Para siswa dapat berdebat secara sehat tentang berbagai isu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Hal ini mencerminkan prinsip dari kebebasan berpendapat.
- f. Keterlibatan Aktif Siswa Dalam OSIS, semua anggota diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan keputusan organisasi. Hal ini mencerminkan prinsip partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi, di mana setiap individu memiliki peran dalam setiap mengambil keputusan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa keterlibatan siswa khususnya OSIS dalam setiap kegiatan sekolah masih sulit untuk dilibatkan. Sebagai negara yang menganut negara demokrasi, sudah seharusnya menanamkan nilai nilai demokrasi dari sejak dini. Penerapan nilai nilai demokrasi sejak

dini melalui sekolah diharapkan mampu menumbuhkan perilaku demokratis yang dapat meningkatkan kesadaran dan jiwa demokratis di setiap orang.

Keberadaan OSIS sudah seharusnya menjadi sarana untuk merepresentasikan suara seluruh warga sekolah yang belum tersalurkan suaranya. Keterlibatan guru yang berlebihan pun seharusnya tidak dilakukan karena itu dapat menghambat kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Guru dicukupkan hanya untuk membina, membimbing, serta mengarahkan siswa agar dapat mengembangkan kemampuan dan potensinya tanpa ada unsur paksaan dari guru.

## DAFTAR REFERENSI

- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25–38. <https://doi.org/10.30603/au.v13i1.95>
- Aulawi, A., & Srinawati, S. (2019). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan organisasi untuk meningkatkan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMK Darus Syifa Kota Cilegon. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 2(1), 38–50.
- Cholisin. (2011). *Pengembangan karakter dalam materi pembelajaran PKN*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Juanda, J., & Rahayu, N. Q. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembelajaran demokrasi di sekolah: Suatu alternatif pembelajaran yang demokratis. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 101–110.
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2017). *Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran*. Kata Pena.
- Safitri, Y. R. (2024). Dampak oligarki dalam pembangunan pendidikan Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 12(03).
- Sobri, M., & Umar, U. (2022). Implementasi pendidikan demokrasi di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 6174–6181.
- Sutisna, O. (2020). Demokrasi dalam pendidikan: Tinjauan terhadap praktik pembelajaran di sekolah. *Jurnal Kependidikan: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 20(2), 112–120.
- Syafitri, E. R., & Nuryono, W. I. R. Y. O. (2020). Studi kepustakaan teori konseling *dialectical behavior therapy*. *Jurnal BK Universitas Negeri Surabaya*, 11(1), 53–59.
- Ukasah, A. (2024). Tantangan implementasi demokrasi dalam konteks negara konstitusi: Studi kasus pada sistem hukum Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 198–210.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yamin, M. (2015). *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. PT Referensi (GP Press Group).